

LKPJ DAN LPPD

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
TANAH LAUT

TAHUN 2024

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT sehingga penyusunan LKPJ dan LPPD Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan. LKPJ dan LPPD merupakan dokumen pertanggungjawaban capaian kinerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja terkait sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan capaian program dan kegiatan baik bersifat fisik maupun keuangan.

LKPJ dan LPPD Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 dimaksudkan sebagai evaluasi bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kedepannya serta mempertanggung jawabkan atas kinerja yang sudah dilaksanakan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Kami menyadari LKPJ dan LPPD tahun 2024 ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKPJ dan LPPD di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap LKPJ dan LPPD ini dapat menjadi bahan untuk pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyampaikan informasi kinerja daerah kepada Pemerintah Pusat atas apa yang sudah dilakukan sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Tanah Laut,



Rudi Intihansyah, S.Pt, M.Si

Pembina / IV.a

NIP.19751110 200701 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum.....	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah.....	1
1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah	1
1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah	1
1.1.2.2 Pengelolaan Pendapatan Daerah	3
1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	4
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	6
1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	11
1.3 Data Umum Daerah.....	13
1.3.1 Data Geografis Wilayah.....	13
1.3.2 Jumlah Penduduk	13
1.3.3 Sumber Daya Lahan.....	13
1.3.4 Sumber Daya Hutan	13
1.3.5 Sumber Daya Air	14
1.3.6 Sumber Daya Kepemudaan dan Olahraga	14
1.3.7 Struktur Organisasi.....	14
1.3.4 Realisasi Belanja Menurut Jenis Pendapatan.....	15
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Ralisasi Belanja	16
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	17
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	17
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	17
3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Utama	17
3.1.3Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	17
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAH	

A.Kerja Sama Antar Daerah	24
BAB V PENUTUP	25



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Dasar Hukum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 pemisahan dari DIPORABUD dan berdiri sendiri Dispora sejak tahun 2017 disebutkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tanah Laut adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kepemudaan dan olahraga yang berada dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang di diberikan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas Dinas kepemudaan dan Olahraga

1.1.2 Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah

1.1.2.1 Kebijakan Pendapatan daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Tanggal 12 Okotber 2024, APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No. 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 (BD No. 47) Tanggal 15 Maret 2024 disusun dengan prinsip sebagai berikut :



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas :

Pendapatan Asli Daerah :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan Transfer :

Dana Perimbangan :

a. Dana Transfer Umum

- 1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)

b. Dana Transfer Khusus

- 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- 2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

- 3) Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus
- 4) Dana Insentif Daerah
- 5) Dana Keistimewaan
- 6) Dana Desa

Transfer Antar-Daerah :

- 1) Pendapata Bagi Hasil
- 2) Bantuan Keuangan

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

- 1) Pendapatan Hibah
- 2) Dana Dana Darurat
- 3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan dari sumber-sumber dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintahan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Dalam kebijakan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

1.1.2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja SKPD terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

- i. Belanja tidak langsung terdiri dari delapan jenis belanja terdiri dari belanja pegawai;
- ii. Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:
 - (1) belanja pegawai;
 - (2) belanja barang dan jasa dan;
 - (3) belanja modal.

1.1.2.3 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan umum keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 8 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2018;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 141 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024-2026. Adapun Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :

“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”

Kata **“BERINTERAKSI”** pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: **“Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”**. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali, tingkat



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun, rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun, pembangunan manusia yang semakin baik, dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin tinggi.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/ modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Tanah Laut saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2018-2023, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut: ***“Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI”***

(Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, Sinergis)



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

Adapun Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak langkah dan tindak nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintah tanpa mengabaikan mandate yang diberikan. Sedangkan Misi pembangunan Kabupaten Tanah Laut untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya
 2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industry kreatif.
 3. Membangun tata kelola pemerintah yang baik (Good Governace)
 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religious dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
 5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersbut di atas maka Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yang terjabar dalam *Misi 1 yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.*

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran menengah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga berikut disampaikan strategi dan arah kebijakan yang tertuang didalam table 5.1.1 sebagai berikut :

**Tabel 5.1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

VISI Bupati dan Wakil Bupati : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI (<i>Berkarya, Inovatif, Tertata, Religius, Aktual, Sinergis</i>)				
MISI : Berkarya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Masyarakat yang Berbasis teknologi untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

1.	Meningkatkan pemuda yang mandiri serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatnya pemuda yang mandiri serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Meningkatkan sistem pembinaan pemuda	a. Memberikan edukasi kepada muda melalui pemilihan pemuda pelopor, kepemimpinan yang berbakat b. Memfasilitasi seleksi dan Pendidikan Paskibraka c. Mengoptimalkan lembaga kepemudaan d. Memberikan pelatihan bagi wirausaha muda
2.			Meningkatnya pemuda mandiri melalui wira usaha	
3			Meningkatkan system pembinaan keolahragaan	a. Mengoptimalkan kelompok olah raga masyarakat b. Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat c. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi, termasuk kaum disabilitas
4			Meningkatkan system atlet yang berprestasi	a. Merumuskan dan mengimplementasikan system pembinaan olahraga yang berkualitas menuju atlet berprestasi

Berdasarkan data tabel di atas, untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang relevan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Strategi “Meningkatkan system pembinaan pemuda ” dengan arah kebijakan “Memfasilitasi seleksi dan Pendidikan Paskibraka dan mengoptimalkan lembaga kepemudaan dan memberikan edukasi kepada muda melalui pemilihan pemuda pelpor dan kepemimpinan
2. Strategi “Meningkatkan wirausaha muda” dengan arah kebijakan “Memberikan pelatihan bagi wira usaha muda.
3. Strategi “Meningkatkan pembinaan keolahragaan” dengan arah kebijakan “Mengoptimalkan kelompok olahraga masyarakat, Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat dan meningkatkan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas.
4. Strategis “ Meningkatkan sistem atlet yang beprestasi” dengan arah kebijakan Merumuskan dan mengimplementasikan system pembinaan olah raga yang berkualitas menuju atlet berprestasi



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.841,37 Km² atau 10,34% (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1-6117 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023) dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan, 135 desa/kelurahan. Daerah yang paling luas yaitu Kecamatan Kintap dengan luas 857,21 Km², Kecamatan Jorong dengan luas 697,84 Km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 419,05 Km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas 68,70 Km².

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu;
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

1.3.2. Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 364.117 jiwa dengan rasio jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah 103,31 yaitu jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dimana dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 103-104 orang penduduk laki-laki. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2024 sebesar 1.156 orang. Latar belakang pendidikan dari pencari kerja ini sebagian besar adalah lulusan SMA/Sederajat yakni 530 jiwa, disusul lulusan SMK sebesar 455 jiwa.

1.3.3. Sumber Daya Lahan

Tahun 2024 luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 71.174 Ha dan lahan tegal/kebun menurut jenis penggunaannya seluas 36,521 Ha, lading/huma seluas 12.630 Ha serta lahan sementara tidak diusahakan 9.436,64 Ha. Jagung merupakan tanaman pangan yang memiliki luas panen terbanyak di Kabupaten Tanah Laut, yaitu seluas 16.408 hektar. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan Kabupaten Tanah Laut adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Luas areal tanaman kelapa sawit pada tahun 2024 mencapai 12.692 Ha. Sementara untuk tanaman karet, pada tahun 2024 sebesar 14.852 Ha

1.3.4. Sumber Daya Hutan

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 adalah sebesar 125.644,11 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, kawasan hutan lindung memiliki luas 13.688,39 Ha, kawasan hutan produksi 70.157,61 Ha, dan kawasan hutan konservasi 27.157,61 Ha dan kawasan tubuh air 435,74 Ha. Kawasan hutan



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) TAHUN 2024

lindung yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kritis seluas 4.652,44 Ha dan kondisi lahan sangat kritis 5.173,04 Ha.

1.3.5. Sumber Daya Air

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2024 berkisar antara 32,50°C sampai 37,40°C, temperatur minimum berkisar antara 18,80°C sampai 22,80°C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,40°C sampai 28,80°C.

Intensitas jumlah curah hujan dari 4,50 mm sampai 564,60 mm dengan jumlah hari hujan antara 4 sampai 25 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan November hingga Mei, meskipun beberapa waktu ke belakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar.

1.3.6. Sumber Daya Kepemudaan dan Keolahragaan

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut agar sejalan dan selaras dengan pencapaian visi dan misi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Hubungan antar kabupaten/kota dengan propinsi dan pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan berjalan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kegiatan kepemudaan diarahkan dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Untuk kegiatan keolahragaan di arahkan untuk pembinaan, penyediaan sarana prasarana olahraga yang representatif sehingga tersedia pelatih dan atlet yang handal dan berprestasi baik regional, nasional maupun internasional.

1.3.7. Struktur Organisasi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut agar sejalan dan selaras dengan pencapaian visi dan misi di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Hubungan antar kabupaten/kota dengan propinsi dan pusat merupakan peluang bagi terbangunnya sinergi yang lebih mantap agar seluruh kegiatan pembangunan khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan berjalan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kegiatan kepemudaan diarahkan dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan. Untuk kegiatan keolahragaan di arahkan untuk pembinaan, penyediaan sarana prasarana olahraga yang representatif sehingga tersedia pelatih dan atlet yang handal dan berprestasi baik regional, nasional maupun internasional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang di diberikan kepada daerah, untuk melaksanakan tugas Dinas kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pembinaan UPTD dinas; dan
- f. Pelaksanaan Fungsi Lain yang di berikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsi;

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanah Laut;
2. Sekretaris;
3. Bidang Kepemudaan;
4. Bidang Olahraga;
5. UPTD Dinas;
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1.3.8. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

1.3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Dispora Tahun 2024

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Penyewaan Bangunan	120.200.000,00	90.140.000	74,99	111.850.000,00	124
3	Retribusi Pelayanan Tempat Rekrasi dan Olahraga	149.162.000,00	153.918.000	103,19	32.832.000,00	20,53
4	Hasil Sewa BMD				229.834.500,00	0
	JUMLAH	269.362.000	244.058.000	90,61	374.516.500,00	9,81



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**

Jumlah realisasi pendapatan Retribusi Daerah selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **244.058.000,00** dan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. **374.516.500,00** Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan.

1.3.1.2. Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun 2024

Arah kebijakan belanja daerah dalam penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2024. Anggaran belanja daerah (Belanja Operasi dan Belanja Modal) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan adalah sebesar **Rp. 43.631.257.921,00**. dengan realisasi sebesar **Rp. 36.991.808.098,00** atau **84,78%**, dengan rincian alokasi belanja dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 1.3 Anggaran Belanja dan Realisasi Tahun 2024

No.	Uraian	TA. 2024			TA. 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Pegawai	4.119.051.373,00	3.664.529.143,00	88,97	3.231.726390,00	88,18
2	Belanja Barang dan Jasa	18.669.649.409,80	14.351.310.431,00	76,87	21.544.054.378,00	((150,11))
3	Belanja Hibah	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	100	4.028.631.770,00	27,78
Jumlah		43.631.257.921,00	36.991.808.098,00	84,78	30.466.199.518,00	82,35

Realisasi Belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **36.991.808.098,00**. atau sebesar **84,78 %**



BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 September 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Anggaran Pendapatan semula Rp. **338.950.000,00** setelah perubahan Berkurang sebesar Rp. **269.362.000** dan Belanja semula Rp. **43.973.981.966,00** bertambang menjadi Rp. **43.631.257.921,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 338.950.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.588.000,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		<u>Rp 269.362.000,00</u>

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 43.973.981.966,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 342.724.045,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 43.631.257.921,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		(Rp.43.361.895.921,00)



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Bupati.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

B. Analisa Capaian Kinerja Dispora Kabupaten Tanah Laut

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara RPJMD dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.



DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

N O	URUSAN PEMERINTAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMEN DARI DPRD
11	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.646.451.779,00	7.488.950.062,00			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.998.064,00	11.568.800,00			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.998.727,00	7.069.400,00			
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.337,00	4.499.400,00			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.125.987.241,00	3.680.266.218,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.119.051.423,00	3.673.986.718,00			



DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	6.935.868,00	6.279.500,00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.809.473,00	7.130.320,00			
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.640.831,00	3.410.320,00			
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.168.642,00	3.720.000,00			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.597.493,00	163.518.000,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.661.493,00	39.690.000,00			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	162.936.000,00	123.828.000,00			



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	961.211.415,00	882.721.139,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.971.796,00	4.431.000,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.622.622,00	305.225.076,00			
				Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	109.118.624,00	88.317.545,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.998.997,00	29.737.200,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	14.850.000,00			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	436.679.737,00			



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	499.376,00	480.581,00			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.459.523.783,00	1.123.453.975,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	939.177.610,00	664.901.000,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	199.819.136,00	178.020.000,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.100.000,00	9.439.500,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-			
				Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	228.740.726,00	206.923.475,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.902.084,00	64.170.000,00			



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.665.498.660,00	1.432.161.163,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	357.000.000,00	244.581.864,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.308.498.660,00	1.187.579.299,00			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.825.650,00	188.130.447,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.498.600,00	29.931.300,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	118.597.050,00	111.399.147,00			



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	49.730.000,00	46.800.000,00			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5.079.278.866,00	4.146.168.660,00			
				Kegiatan Penyadaran Pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota	2.459.176.171,00	2.012.722.264,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	99.981.880,00	94.109.960,00			



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	99.969.926,00	81.716.283,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	99.973.823,00	89.911.000,00			
				Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	699.844.305,00	608.611.494,00			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaa20.n Melalui	409.824.971,00	286.615.556,00			



DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	349.820.883,00	311.556.787,00			
				Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	499.937.080,00	373.002.200,00			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	199.894.949,00	167.198.984,00			
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.620.10.695,00	2.133.446.396,00			



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	152.484.847,00	67.755.000,00			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.467.617.848,00	2.065.691.396,00			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	28.855.602.276,00	24.537.373.205,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	8.660.708.198,00	6.133.990.906,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga	197.473.218,00	87.653.056,00	agenda latihan tidak terselenggaran,		



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha					
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	648.977.946,00	558.373.190,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.814.257.034,00	5.487.964.660,00			
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.587.249.501,00	2.605.385.355,00			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.087.287.436,00	1.575.978.473,00			



DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.499.962.065,00	1.029.406.882,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.179.910.997,00	772.039.964,00			
				Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	599.977.987,00	443.689.500,00			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	440.489.010,00	235.346.774,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	139.444.000,00	93.003.690,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00			
				Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12.900.000.000,00	12.900.000.000,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.527.733.580,00	2.125.956.980,00			



DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	749.919.775,00	671.745.000,00			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.298.083.771,00	1.052.029.284,00			
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	479.730.034,00	402.182.696,00			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.049.925.000,00	1.034.288.856,00			
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.049.925.000,00	1.034.288.856,00			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	49.925.000,00	34.288.856,00			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00			
				JUMLAH	43.631.257.921,00	37.206.780.783,00			



**DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024**



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

Tabel 3.2
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		%	
			Fisik			Keuangan
			Fisik	%		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.646.451.779,00			7.488.950.062,00	86,61
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.998.064,00	Dok		11.568.800,00	89,00
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.998.727,00	7 Dok	100	7.069.400,00	88,38
2.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.337,00	5 Lap	100	4.499.400,00	90,00
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.125.987,241,00	persen	100	3.680.266.218	89,20
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.119.051.373,00	18 bulan	90	3.673.986.718,00	89,19
4.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.935.868,00	5 Dokumen	100	6.279.500,00	90,54
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	9.809.473,00	Persen		7.130.320,00	72,69
5	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah	4.640.831,00	2 Dok	100	3.410.320,00	73,49
6	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.168.642,00	4 Dok	80	3.720.000,00	71,97
III	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	208.597.493,00			163.518.000,00	78,39



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

7	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.661.493,00	120 Paket	95,24	39.690.000,00	86,92
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	162.936.000,00	13 Orang	100	123.828.000,00	76,00
IV	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.452.477,00		100	574.945.814,00	92,67
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.971.796,00	1 paket	100	4.431.000,00	89,12
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	338.622.622,00	8 paket	88,89	305.225.076,00	90,14
11	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	109.118.624,00	4 paket	100	88.317.545,00	80,94
12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.998.997,00	2 paket	66,67	29.737.200,00	74,34
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	12 Dok	100	3.000.000,00	100
14	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/ Material	15.000.000,00	1 paket	100	14.850.000,00	99,00
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450.000.000,00	100 Laporan	100	436.679.737,00	97,04
16	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	499.376,00	1 Dok	100	480.581,00	96,24
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.459.523.783,00			1.123.453.975,00	76,97

32
32



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

17	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	939.177.610,00	4 unit	100	664.901.000,00	70,80
18	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	199.603.363,00	38 unit	92,68	178.020.000,00	89,19
19	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.100.000,00	1 unit	100	9.439.500,00	85,04
20	Sub Kegiatan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	228.74.726,00	1 unit	100	64.170.000,00	79,32
21	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.902.084,00	2 unit	100	64.170.000,00	79,32
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.665.498.660,00		95,55	1.432.161.163,00	85,99
22.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	357.000.000,00	8 laporan	66,67	244.581.864,00	68,51
23.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.308.498.600,00	12 Laporan	100	1.187.579.299,00	90,76
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.825.650,00			188.130.300,00	92,75
24.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.498.600,00	1 Unit	100	29.931.300,00	86,76
25.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	118.597.500,00	7 Unit	100	111.399.147,00	93,93



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan					
26.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.730.000,00	74 unit	100	46.800.000,00	94,11
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5.079.278.866,00			4.146.168.660,00	81,63
VII I.	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.459.176.171,00			2.012.722.264,00	81,85
27.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	99.981.880,00	35 Orang	100	94.109.960,00	94,13
28	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	99.969.926,00	25 Orang	83,33	81.716.283,00	81,74
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	99.973.823,00	70 Orang	94,59	89.911.000,00	89,93



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

	Kader Kabupaten/Kota					
30	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	699.844.305,00			608.611.494,00	86,96
31	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaa20.n Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	409.824.971,00	1 Dok	100	286.615.556,00	69,94
32	Sub Kegiatan Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	349.820.883,00	2 unit	100	311.556.787.,00	89,07
33	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan	499.937.080,00	25 orang	86,21	373.002.200,00	74,61



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

	Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi					
34	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	199.894.949,00	10 orang	100	167.198.984,00	83,64
IX	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.620.10.695,00			2.133.446.396,00	81,43
35	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	152.484.847,00	15 Orang	60	67.755.000,00	44,43
36	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	2.467.617.848,00	7 Dok	100	2.065.691.396,00	83,71
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	29.500.844.779,00			24.537.373.205,00	85,04
VIII	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	8.660.708.198,00			6.133.990.906,00	70,83
37.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan	197.473.218,00	1 unit	100	87.653.056,00	44,39



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

	Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha					
38	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	648.977.946,00	4 Dok	100	558.373.190,00	86,04
39	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	7.814.257.034,00	20 unit	80	5.487.964.660,00	70,23
X	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.587.249.501,00			2.605.385.355,00	72,63
40.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.087.287.436,00	1 Dok	100	1.575.978.473,00	75,50
41.	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1.499.962.065,00	201 orang	67	1.029.406.882,00	68,63



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
TAHUN 2024

XI	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.179.910.997,00			772.039.964,00	65,43
42.	Sub Kegiatan Seleksi Atlet Daerah	599.977.987,00	170 orang	85	443.689.500,00	73,95
43	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	440.489.010,00	50 orang	50	235.346.774,00	53,43
44	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	139.444.000,00	1 Dok	100	93.003.690,00	66,70
XII	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	12.900.000.000,00			12.900.000.000,00	100
45.	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	12.900.000.000,00	4 Organisasi	100	12.900.000.000,00	100
XII I	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.527.733.580,00			2.125.956.980,00	84,11
46.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	749.919.775,00	1 Dok	100	671.745.000,00	89,58
47	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1.298.083.771,00	13 Lap	86,67	1.052.029.284,00	81,04
48	Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga	479.730.034,00	1 Dok	100	402.182.696,00	83,84

	Tradisional dalam Masyarakat					
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.049.925.000,00			1.034.288.856,00	98,51
XIV	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.049.925.000,00			1.034.288.856,00	98,51
49.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	49.925.000,00	105 orang	70	34.288.856,00	68,68
50	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1.000.000.000,00	1 lap	100	1.000.000.000,00	100
	JUMLAH	43.631.257.921,00		77,47	37.206.780.783,0	85,28

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

1. Strategi “Meningkatkan system pembinaan pemuda ” dengan arah kebijakan “Memfasilitasi seleksi dan Pendidika Paskibraka dan mengoptimalkan lembaga kepemudaan dan memberikan edukasi kepada muda melalui pemilihan pemuda pelopor dan kepemimpinan
2. Strategi “Meningkatkan wirausaha muda” dengan arah kebijakan “Memberikan pelatihan bagi wira usaha muda.
3. Strategi “Meningkatkan pembinaan keolahragaan” dengan arah kebijakan “Mengoptimalkan kelompok olahraga masyarakat, Meningkatkan pembinaan olahraga bagi masyarakat dan meningkatkan pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas.
4. Strategis “ Meningkatkan sistem atlet yang beprestasi” dengan arah kebijakan Merumuskan dan mengimplementasikan system pembinaan olah raga yang berkualitas menuju atlet berprestasi

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM
PEMERINTAH

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan kegiatan kerjasama daerah pada tahun 2024 adalah :

1. Mitra yang diajak kerjasama Tahun 2024 tidak ada kegiatan bermitra atau kerjasama dengan daerah lain